

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang ditandai dengan banyaknya pembangunan di berbagai sektor. Banyaknya pembangunan di berbagai sektor dimaksudkan agar dapat mempersiapkan diri dalam menyongsong era globalisasi. Jika dibandingkan dengan beberapa Negara di Eropa tentunya Indonesia masih tertinggal cukup jauh, akan tetapi jika dibandingkan dengan beberapa Negara di Asia Tenggara Indonesia hanya lebih baik dari IPM Myanmar yang menduduki posisi 149, Kamboja 138, dan Timor Leste 134.

*Human Development Index* (HDI) Indonesia tahun 2013 menurut *Human Development Report 2013* (2013, hlm. 148-150) menduduki peringkat 121 dari 186 negara. Jika dibandingkan dengan Negara berkembang lainnya seperti China 101, Meksiko 61, dan Mesir 112 tentunya Indonesia masih jauh dari IPM yang diharapkan dengan kondisi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa kondisi pembangunan sosial ekonomi, tingkat kesejahteraan masyarakat, tingkat pendidikan serta tingkat kesehatan masyarakat masih jauh dari yang diharapkan.

Indonesia sebagai Negara besar yang tergabung dalam kelompok Negara-negara Asia Tenggara (*Association South East Of Asian Nation*) merupakan Negara yang dalam tingkat perkembangan ekonominya belum begitu mapan. Bahkan para ahli ekonom mengatakan, Negara Indonesia sebagai salah satu Negara anggota ASEAN dalam tingkat persaingan ekonomi masih tertinggal dibandingkan dengan Negara anggota ASEAN lainnya.

Keterpurukan ekonomi Indonesia semakin menjadi ketika pada tahun 1997 terjadi krisis yang berawal dari melemahnya nilai tukar rupiah. Indonesia mengalami krisis berkepanjangan, sampai saat ini dampak keterpurukan ekonomi Indonesia masih dirasakan ketidakstabilannya, meskipun saat ini kondisinya sedikit demi sedikit sudah mengalami peningkatan.

Selama satu dekade terakhir Indonesia telah menunjukkan peningkatan substansial dalam indikator ekonomi dan sosial. Hal ini ditandai dengan pengurangan kemiskinan secara bertahap baik itu di wilayah perkotaan dan pedesaan. Meskipun pencapaian ini cukup mengesankan, akan tetapi 13 persen penduduk masih dalam kemiskinan, dan 40 persen rumah tangga lainnya hidup sedikit di atas garis kemiskinan dan rentan untuk jatuh ke dalam jurang kemiskinan kembali.

Data yang dikeluarkan oleh BPS mengenai jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2013 mencapai 28,55 juta orang (11,47 persen). Hal ini mengalami peningkatan dalam hal perbaikan tingkat kemiskinan jumlah penduduk di Indonesia selama enam bulan terakhir yaitu pada bulan Maret 2013 penduduk miskin sebesar 28,07 juta orang (11,37 persen). Apabila kita menengok ke belakang, jumlah dan prosentase penduduk miskin di Indonesia menurun dari tahun 2004 ke 2005. Akan tetapi pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan, hal ini disebabkan karena harga kebutuhan pokok melambung tinggi yang digambarkan oleh inflasi sebesar 17,95 persen. Namun sejak tahun 2007 sampai dengan Maret 2013 jumlah maupun prosentasi penduduk miskin mengalami penurunan.

Menurut Syawie dalam Nainggolan (2012, hlm. 1) kemiskinan merupakan kondisi saat seseorang atau sekelompok orang tak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan telah membuat rakyat tidak dapat mengenyam pendidikan yang layak, kesulitan memenuhi gizi dan kesehatan, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga dan kemiskinan juga dapat menyebabkan terbatasnya pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan. Hal ini yang menyebabkan rendahnya tingkat *Human Development Index* pembangunan manusia Indonesia, karena sulitnya mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan yang terjamin dan mendapatkan pekerjaan yang layak.

Kemiskinan dapat dikatakan sebagai permasalahan yang sangat kompleks dan kronis, dengan demikian penanggulangan permasalahan kemiskinan pun

diperlukan solusi yang tepat dan terintegrasi dengan berbagai pihak dari berbagai komponen serta bersifat berkelanjutan. Secara umum ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kemiskinan, diantaranya adalah faktor pendidikan, ekonomi dan kesehatan, dimana dari ketiga faktor tersebut dapat disebabkan baik itu secara kultur dan juga structural.

Kemiskinan dapat mempengaruhi kehidupan keluarga dalam berbagai hal. Dari perspektif orang miskin, Kempson (1996) dalam Nainggolan (2012, hlm. 2) menunjukkan:

“Bahwa kemiskinan berdampak pada empat bidang yang luas, yakni 1) psikologis, dimana kemiskinan berkaitan dengan hilangnya harga diri, perasaan tak berdaya, kemarahan, kecemasan dan perasaan bosan sangat kuat; 2) fisik, yakni kemiskinan dianggap merusak kesehatan dan *well-being*; 3) relasional, yakni kemiskinan membuat hubungan sosial dan personal buruk; serta 4) praktis, dimana kemiskinan membatasi pilihan, belanja dan pengasuhan anak.”

Tingkat kemiskinan suatu masyarakat dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah karena pengaruh globalisasi. Kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan karena sulitnya mendapatkan akses pendidikan serta pekerjaan yang memadai dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dalam hidupnya.

Kemiskinan di Propinsi Jawa Barat menurut Data Badan Pusat Statistik pada bulan Maret 2014 sebesar 4.327.065 orang (9,44 persen). Data tersebut jika dibandingkan data pada bulan September 2013 tingkat kemiskinan di Jawa Barat menurun sebesar 48.107 orang (0,18 persen) dari data yang berjumlah 4.375.172 orang (9,61 persen). Salah satu kriteria kondisi masyarakat miskin yaitu rendahnya tingkat pendapatan, tidak terpenuhinya pemenuhan kesehatan dan gizi mereka. Rendahnya pendapatan masyarakat juga menyebabkan sulitnya masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang layak dan memadai. Rendahnya pendidikan pada akhirnya dapat mengakibatkan terbatasnya akses lapangan kerja dalam rangka memperoleh nafkah untuk keluarganya.

Wilayah Kabupaten Bandung sebagai salah satu bagian dari Jawa Barat seperti yang dikutip dari *press release* humas setda Kabupaten Bandung menurut penuturan dari Wakil Bupati Bandung H. Deden R. Rumaji, M.Ap. ingin menargetkan penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bandung pada tahun 2015 menjadi 7,42% dari 9,42% pada posisi tahun 2010. Dalam rangka menanggulangi kemiskinan memang bukan pekerjaan yang mudah, yaitu dengan melibatkan dari berbagai hal baik itu pemerintah, swasta dan kalangan masyarakat sendiri.

Menurut Data BPS Kabupaten Bandung 2014, jika melihat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebagai indikator yang menggambarkan banyaknya penduduk yang bekerja pada usia kerja pada tahun 2013 Kabupaten Bandung 65,47% dengan besaran persentase Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) sebesar 89,81% dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 10,19%. Data bukan angkatan kerja yaitu Ibu Rumah Tangga sebanyak 550.066 orang.

Sharp,et,al dalam Kuncoro (2003, hlm. 131) mengidentifikasi penyebab kemiskinan yang dipandang dari segi ekonomi. *Pertama*, dilihat secara mikro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan kualitas sumberdaya yang menyebabkan distribusi sumberdaya menjadi timpang, karena masyarakat miskin hanya memiliki sumber daya yang sangat terbatas. *Kedua*, masyarakat miskin memiliki kualitas sumber daya manusia yang rendah, karena minimnya akses pendidikan yang bisa diakses sehingga tingkat pendidikan dan pengetahuan pun menjadi terbatas yang pada akhirnya upahnya pun rendah. *Ketiga*, kemiskinan disebabkan karena perbedaan akses dalam modal.

Ketidakberdayaan masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah: jaminan ekonomi yang kurang, tidak memiliki pengalaman dalam arena politik, tidak memiliki akses terhadap informasi yang lebih luas, kondisi finansial yang tidak mendukung, ketiadaan pelatihan-pelatihan dan adanya ketegangan fisik maupun emosional. Ketidakberdayaan yang dialami sekelompok masyarakat merupakan hasil dari ketimpangan sosial yang ada di lingkungan masyarakat sehingga mereka menganggap diri mereka lemah dan tidak berdaya karena masyarakat yang menganggapnya demikian. Begitupun kemiskinan yang terjadi

oleh para perempuan, dimana kemiskinan terjadi karena ketidaksamaan pemilikan sumberdaya atau adanya ketimpangan dalam distribusi sumberdaya.

Pengentasan kemiskinan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses pembangunan dimana masyarakat memiliki inisiatif untuk memulai berbagai kegiatan dalam rangka memperbaiki situasi dan kondisi mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat dapat terjadi jika masyarakat terlibat secara langsung serta turut berpartisipasi. Pemberdayaan masyarakat dinilai berhasil, jika kelompok masyarakat menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subyek, artinya masyarakat berperan sebagai motor penggerak bukan saja hanya sebagai penerima manfaat atau obyek saja.

Peran pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka mengurangi kemiskinan melalui konsep pembangunan partisipatif dengan melibatkan masyarakat, dimana masyarakat umumnya bukan saja sebagai objek tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-benar tumbuh dari masyarakat sendiri (*Bottom-up*).

Pemerintah menanggulangi masalah kemiskinan dengan berbagai program seperti PKH, Bantuan Sosial, PNPM dan beberapa program lain. Pemerintah pun menerbitkan Undang-undang untuk mengeluarkan dana tanggung jawab sosial perusahaan dalam rangka mengatasi permasalahan sosial seperti kemiskinan, kesehatan dan kesejahteraan lainnya yang biasa disebut *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Program CSR atau *Community Development* yang dilakukan oleh pihak swasta dapat berupa kemitraan, pendampingan, pemberian pinjaman lunak pada kelompok usaha kecil dan menengah, pelatihan kewirausahaan, pelatihan keterampilan kerja, pembinaan kelompok tani, pemberian beasiswa dan lain sebagainya. Dari beberapa program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat mencapai kondisi sosial ekonomi yang lebih baik sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat.

Pada dasarnya tuntutan masyarakat dari program CSR ini adalah peningkatan kesejahteraan, hal ini dapat diterjemahkan dengan adanya peningkatan pertumbuhan dan pemerataan (*growth and equity*). Dalam hal ini dapat diartikan sebagai adanya peningkatan laju investasi, pemberdayaan ekonomi pedesaan, muncul wirausaha baru dipedesaan, peningkatan lapangan kerja, serta pemerataan pendapatan dan kualitas akses bagi masyarakat.

Keberadaan CSR dari Shafira Corporation berupa Shafira Foundation dalam salah satu programnya adalah membantu memberdayakan para perempuan-perempuan tingkat ekonomi menengah ke bawah yang memiliki kegiatan usaha. Kegiatan usaha yang mereka jalani cenderung hanya untuk mengisi waktu luang saja dan hanya sebagai tambahan untuk kebutuhan dapur, bukan dijadikan sebagai sebuah kegiatan wirausaha yang serius untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarganya. Dengan adanya program dari Shafira Foundation ini diharapkan kegiatan usaha yang dilakukan oleh ibu-ibu dapat semakin berkembang dan menjadi kegiatan usaha yang dapat membantu kondisi ekonomi di lingkungan keluarganya.

Melihat realitas yang ada saat ini, perempuan masih dianggap sebagai warga kelas dua, artinya mereka dianggap sebagai kaum lemah yang tidak memiliki kemampuan lebih dibandingkan dengan kaum lelaki. Perempuan dianggap sebagai orang yang tidak memiliki tingkat pendidikan tinggi serta keterampilan yang tidak mumpuni ketika mereka masuk ke dunia kerja.

Permasalahan yang terjadi selanjutnya yaitu para mitra binaan yang memiliki kegiatan usaha tidak memiliki pengetahuan dan motivasi yang lebih dalam rangka mengembangkan usaha yang dimilikinya agar dapat membantu perekonomian keluarga, kondisi yang ada saat ini yaitu mereka hanya menjalankan usaha sekedarnya karena yang terpenting bagi mereka saat ini adalah setiap harinya ada pemasukan untuk kebutuhan dapur.

Program yang dilakukan oleh Shafira Foundation dalam hal ini adalah melakukan pendampingan berupa pemberian bekal tentang manajemen wirausaha, pembukuan kegiatan usaha, inovasi produk pemasaran dan lain-lain dalam rangka meningkatkan omset, pemahaman tentang pengaturan keuangan

keluarga dan pemahaman agama serta memberikan pinjaman modal lunak bagi mereka yang memang membutuhkan tambahan modal untuk meningkatkan kondisi usahanya.

Pemberian bantuan pinjaman modal atau bantuan modal usaha merupakan langkah usaha sebagai salah satu cara memperluas seseorang untuk bekerja, berusaha dan mengaktualisasikan potensi produksinya. Pemberian pinjaman modal usaha ini harapannya adalah mereka bisa keluar dari kemiskinan seiring dengan adanya peningkatan pendapatan. Jenis-jenis usaha yang dilakukan oleh kaum perempuan sebagai peserta binaan dengan tingkat ekonomi menengah kebawah ini seperti perdagangan, pengolahan makanan industri berteknologi rendah, konveksi, dan jasa.

Pendampingan dilakukan untuk mengawal atau memonitoring penggunaan bantuan pinjaman agar digunakan sebagaimana mestinya untuk mengembangkan usaha yang sudah dijalankannya. Pendampingan dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia berupa pemberian motivasi kelompok dalam menjalankan usaha, pelatihan pembukuan dan perhitungan akuntansi sederhana usaha, inovasi produk, cara memperluas pasar, latihan membaca bagi yang buta huruf, gender, dan partisipasi terhadap lingkungan masyarakat. Akan tetapi kegiatan pendampingan yang lebih ditekankan adalah pada motivasi usaha, pembukuan dan akuntansi sederhana, inovasi produk dan cara memperluas pasar dalam rangka pengembangan kegiatan usahanya. Kegiatan pendampingan ini dilakukan oleh para *field officer* yang rutin datang dalam kelompok masyarakat tersebut setiap satu minggu satu kali untuk memberikan materi. Pendampingan yang dilakukan oleh para *field officer* Shafira Foundation ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Ife (2008, hlm. 558) yaitu sebagai motivator, fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat dan peran-peran teknis.

Kegiatan pendampingan dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan kesiapan antara *field officer* dengan mitra binaan. Mitra binaan merupakan orang dewasa antara usia 20 – 60 tahun sehingga mereka memiliki pengalaman dan kesibukan yang berbeda-beda. Kesepakatan antara pendamping dengan mitra binaan dilakukan karena mengacu pada proses pembelajaran orang dewasa, bahwasanya

pembelajaran pada orang dewasa dapat berjalan efektif ketika peserta didik memiliki kesiapan untuk belajar.

Seorang pendamping (*field officer*) bukan hanya sekedar orang yang mampu berada di depan para kelompok binaan yang sedang diberikan materi pembelajaran berkaitan dengan kewirausahaan dan kemudian membekali mereka dengan sejumlah informasi tertentu, akan tetapi jauh lebih penting dari itu, seorang *field officer* (pendamping) dituntut untuk mengelola kegiatan pendampingan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Sehingga diharapkan peserta program dapat mengikuti pembelajaran dengan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Peserta program LKM Kewirausahaan dari Shafira Foundation ini memiliki berbagai macam latar belakang pendidikan, motivasi, kegiatan usaha, dan juga usia yang berbeda. Menghadapi peserta dengan berbagai macam karakteristik tentunya menuntut kemampuan dan keterampilan *field officer* untuk mengelola kegiatan pembelajaran sesuai dengan berbagai macam karakteristik tersebut.

Pentingnya kegiatan pendampingan pada program LKM Kewirausahaan Shafira Foundation yaitu kualitas pengelolaan pembelajaran dan pemahaman mengenai manajemen serta inovasi dalam kegiatan usaha merupakan komponen yang sangat penting diperhatikan agar tujuan pendampingan program dapat dicapai secara optimal. Berkaitan dengan hal tersebut perlu diteliti tentang pengelolaan pembelajaran/pendampingan program dengan menggunakan pendekatan andragogi terutama dalam penerapan prinsip-prinsip andragogi dalam kegiatan pembelajarannya.

Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan dalam latar belakang ini berkaitan dengan salah satu cara dalam rangka pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pihak swasta yang dalam hal ini dilakukan oleh CSR Shafira Corporation melalui Shafira Foundation dengan program LKM Kewirausahaan, dimana sasaran utamanya adalah perempuan tingkat ekonomi menengah ke bawah yang memiliki kegiatan usaha untuk dikembangkan melalui bantuan pinjaman modal serta adanya pendampingan yang dilakukan oleh para *field officer*, dengan ini penulis

mengangkat penelitian yang berjudul “**Studi Pendampingan Dengan Pendekatan Andragogi Dalam Meningkatkan Perilaku Berwirausaha**”

## **B. Identifikasi Masalah**

Keberhasilan usaha seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal diantaranya adalah kemauan, sikap dan perilaku mitra binaan sebagai perempuan yang menjalankan kegiatan wirausaha kecil dan menengah, kemampuan usaha dan juga kelemahan yang dimilikinya, sedangkan faktor eksternal dalam hal ini diantaranya adalah kesempatan dan peluang, bantuan pinjaman modal, dan pendampingan oleh *field officer*.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diungkapkan dapat diidentifikasi masalah yang dihadapi adalah:

1. Kondisi para mitra binaan yang merupakan ekonomi menengah ke bawah memiliki keterbatasan modal dalam rangka mengembangkan usahanya;
2. Terbatasnya pengetahuan para mitra binaan tentang pengembangan usaha, sehingga para mitra binaan tidak mengetahui bagaimana mengelola usaha yang mereka jalankan agar selalu berkembang;
3. Daya dukung pemerintah setempat yang cukup baik dalam rangka membantu para warganya untuk maju, akan tetapi tidak ada orang-orang yang membantu untuk menggerakkan dan memberikan pengetahuan berkaitan dengan pengembangan bisnis usaha kecil.
4. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh mitra binaan yang mayoritas merupakan pedagang kecil, hanya berpikir untuk sekedar menjalankan usahanya saja tanpa memikirkan untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat membantu ekonomi di dalam keluarganya menjadi lebih baik.
5. Karakteristik mitra binaan berdasarkan usia berbeda-beda, yaitu pada rentang usia 20-60 tahun serta latar belakang pendidikan yang berbeda-beda pula akan tetapi sebagian besar pendidikan mitra binaan hanya sampai pada Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan usaha yang dijalankan oleh mitra binaan pun berbeda-beda. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, keahlian serta pembentukan karakter wirausaha mitra binaan

melalui pendampingan ini, metode pembelajaran orang dewasa (andragogi) akan sangat tepat digunakan.

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang dan identifikasi masalah, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: “Bagaimana pendampingan dengan pendekatan andragogi dalam meningkatkan perilaku berwirausaha mitra binaan pada program LKMK Shafira Foundation ?”

Dari uraian di atas, batasan masalah penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana langkah-langkah pendampingan dengan pendekatan andragogi dalam meningkatkan perilaku berwirausaha mitra binaan ?
2. Bagaimana penerapan prinsip andragogi dalam meningkatkan perilaku berwirausaha mitra binaan melalui pendampingan ?
3. Bagaimana perubahan perilaku berwirausaha mitra binaan melalui pendampingan dengan pendekatan andragogi ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan penelitian di atas, tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh data tentang langkah-langkah pendampingan dengan pendekatan andragogi dalam meningkatkan perilaku berwirausaha mitra binaan;
2. Untuk memperoleh data tentang penerapan prinsip andragogi dalam meningkatkan perilaku berwirausaha mitra binaan melalui pendampingan;
3. Untuk memperoleh data tentang perubahan perilaku mitra binaan melalui pendampingan dengan pendekatan andragogi.

### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki dua manfaat, yaitu manfaat secara akademis dan manfaat secara praktis.

### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan terutama dalam kajian-kajian pendidikan Nonformal khususnya pada bidang pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dalam peningkatan ekonomi kecil di masyarakat khususnya dalam pendampingan program, bantuan modal usaha, dan perilaku wirausaha masyarakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan di masyarakat melalui kegiatan kewirausahaan.

### 2. Secara Praktis

- a. Memberikan sumbangan nyata mengenai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kewirausahaan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendampingan atau pembimbingan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan pada perempuan wirausaha di pedesaan dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah
- b. Meningkatkan wawasan dan kemampuan penelitian untuk peneliti lebih lanjut, khususnya pada kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, kewirausahaan dan pendampingan program kewirausahaan.

## F. Struktur Organisasi Tesis

**BAB I** : Pendahuluan, dimana didalamnya membahas latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, paradigm penelitian, hipotesis penelitian, metodologi penelitian dan struktur organisasi tesis.

**BAB II** : Kajian pustaka, Kerangka Pemikiran yang berisi mengenai konsep/teori/dalil/hukun dan turunannya dalam bidang yang dikaji, penelitian terdahulu yang relevan dengan bidang yang diteliti termasuk prosedur, subjek dan temuannya,

**BAB III** : Metode penelitian yang berisi penjabaran mengenai: lokasi dan subjek penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, operasional

variabel. Uji validitas dan reliabilitas, prosedur pengumpulan data dan teknik pengolahan dan analisis data.

**BAB IV** : Hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari pengolahan data analisis data untuk menghasilkan temuan, serta pembahasan dan analisis temuan

**BAB V** : Simpulan dan rekomendasi.